

## IMPLEMENTASI PROGRAM OPEN GOVERNMENT PARTNERSHIP DI KABUPATEN BOJONEGORO

Ahmad Suprastiyo

Program Studi Administrasi Publik, FISIP, Universitas Bojonegoro

Jl. Lettu Suyitno No 2 Bojonegoro

Email : [tiyopras207@gmail.com](mailto:tiyopras207@gmail.com)

### **Abstract**

*To create good governance, the Government of Bojonegoro Regency has a policy that regulates Public Information Disclosure. The purpose of this study is to identify and analyze the factors that hinder the implementation of the Open Government Partnership Program in Bojonegoro Regency. The focus of this research is on the transparency of public information which consists of village regulation initiatives, information media, transparency, quality of information, creativity in developing transparency, and information technology. The method used is an exploratory method with a qualitative approach. The theory used to determine the factors that influence implementation is the theory used by Charles O'Jones which includes Implementing Organization, Interpretation, Implementation. The results showed that the implementation of the Open Government Partnership Program in Bojonegoro Regency did not go well. This is evidenced by the fact that there are still villages that have not implemented the Open Government Partnership properly. Here it appears that the implementation in terms of transparency is very lacking.*

*Keywords : Policy, Implementation, Open Government Partnership*

### **Abstrak**

Untuk terciptanya tata kelola yang baik Pemerintah Kabupaten Bojonegoro memiliki Kebijakan yang mengatur tentang Keterbukaan Informasi Publik. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui dan menganalisa faktor - faktor yang menghambat pelaksanaan implementasi Program *Open Government Partnership* di Kabupaten Bojonegoro. Fokus penelitian ini adalah pada transparansi informasi publik yang terdiri dari inisiatif regulasi desa, media informasi, transparansi, kualitas informasi, kreatifitas pengembangan transparansi, dan teknologi informasi. Adapun metode yang digunakan adalah metode eksploratif dengan pendekatan kualitatif. Teori yang digunakan untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi implementasi adalah teori yang digunakan oleh Charles O'Jones yang meliputi Organisasi Pelaksana, Interpretasi, Pelaksanaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Implementasi Program *Open Government Partnership* di Kabupaten Bojonegoro tidak berjalan dengan baik. Ini dibuktikan dengan masih adanya desa yang belum menjalankan *Open Government Partnership* sebagaimana mestinya. Di sini tampak implementasi dari segi transparansi sangat kurang.

Keywords :Kebijakan, Implementasi, Open Government Partnership

## PENDAHULUAN

Transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan sudah menjadi kebutuhan yang tidak dapat diabaikan lagi. Untuk mewujudkan pertanggung jawaban pemerintah terhadap warganya salah satunya cara dilakukan dengan menggunakan prinsip transparansi (keterbukaan). Melalui transparansi penyelenggaraan pemerintah, masyarakat diberikan kesempatan untuk mengetahui kebijakan yang akan dan telah diambil oleh pemerintah juga melalui transparansi penyelenggaraan pemerintah tersebut, masyarakat dapat memberikan *feedback* atau *outcomes* terhadap kebijakan yang telah diambil oleh pemerintah.

Transparansi berarti masyarakat harus dapat memperoleh informasi secara bebas dan mudah tentang proses dan pelaksanaan keputusan yang diambil. Secara umum akuntabilitas publik tidak akan terjadi tanpa ditunjang transparansi dan kejelasan aturan hukum (hidayat, 2007).

Open Government Partnership adalah keterbukaan informasi dari pemerintah untuk masyarakat. Dalam sistem OGP semua informasi yang berkaitan dengan keuangan pemerintahan yang difungsikan untuk memberikan ruang kepada masyarakat dalam memantau keuangan negara atau daerah. Open Government Partnership sejalan dengan keterbukaan informasi publik yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik (KIP) dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik. Dalam mendorong akses informasi luas terhadap kegiatan badan publik yang dibiayai negara dan pelayanan publik yang murah, mudah, dan berkualitas (Dinas Kominfo, 2017)

Bojonegoro adalah satu-satunya daerah yang mewakili Indonesia dalam ajang OGP internasional. Bojonegoro bersanding dengan 14

kabupaten/kota lain dari berbagai negara, seperti Madrid (Spanyol), Paris (Prancis), Sao Paolo (Brasil), dan Seoul (Korea) untuk berkompetisi sebagai daerah dengan pemerintahan paling terbuka di dunia. Sejumlah 15 sub national yang terpilih sebagai pilot project *Open Government Partnership* (OGP) telah melakukan pertemuan di Washington DC tanggal 15-16 September 2016, dan Bojonegoro terpilih sebagai salah satu tamu undangan.

*Open Government Partnership* (OGP) merupakan model pemerintahan yang diterapkan oleh Pemerintah Kabupaten Bojonegoro yang dimulai sejak tahun 2008. Melakukan berbagai sistem pengaduan masyarakat melalui dialog publik, SMS, dan anjang sana. Di tahun 2010 Bojonegoro mengadakan pengaduan publik melalui radio, kotak aduan, dan media cetak. Program Siap-Lapor juga memberikan jalan mudah bagi setiap individu untuk menyampaikan pendapatnya dengan bebas yang tidak perlu harus mewakili komunitas tertentu. Pemerintah Kabupaten Bojonegoro juga mendorong adanya desa terbuka mengacu pada empat variabel penting.

Berdasarkan data Dinas Kominfo pada tahun 2018 dapat diketahui bahwa terdapat 50 desa yang telah menjalankan OGP dan 369 desa yang belum menjalankan *Open Government Partnership* di Kabupaten Bojonegoro. namun, dari 50 desa yang telah menjalankan OGP masih adanya pembagian kelas didalamnya dimana terbagi menjadi 7 (tujuh) desa masuk dalam desa terbuka, 31 (tiga puluh satu) desa masuk dalam desa menuju terbuka, 12 (dua belas) desa masuk dalam kategori desa kurang terbuka dan 369 (tiga ratus delapan puluh) masuk dalam kategori desa belum terbuka dengan penilaian 4 (empat) indikator yaitu transparansi, partisipasi, akuntabilitas, dan inovasi. Melihat masih adanya pembagian

kelas di dalam 50 desa yang telah menjalankan OGP dan 369 desa belum menjalankan OGP.

Secara sederhana implementasi bisa diartikan pelaksanaan atau penerapan. Implementasi adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan (Usman, 2004). Implementasi merupakan suatu rangkaian aktivitas dalam rangka menghantarkan kebijakan kepada masyarakat sehingga kebijakan tersebut dapat membawa hasil sebagaimana diharapkan (Syaukani, 2003).

Keterbukaan informasi publik di Kabupaten Bojonegoro belum berjalan dengan baik. ada sejumlah ketidakpuasan dari masyarakat terkait dengan pelaksanaan *Open Government Partnership*, seperti : 1) Dalam penyampaian informasi mengenai pendapatan desa dan penggunaannya belum dilaksanakan secara detail/rinci, 2) Masih belum adanya forum pertemuan warga atau forum tatap muka dalam pengembangan transparansi, 3) belum adanya media informasi sebagai inisiatif desa dalam mendukung transparansi dan pelayanan informasi publik.

## **METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian yang digunakan ialah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian ini berlokasi di Kabupaten Bojonegoro. Fokus penelitian ini ialah proses implementasi sesuai model O'Jones (dalam Suprastiyo, 2019) terdiri dari 1) Organisasi, 2) Interpretasi, dan 3) Pelaksanaan. Pengambilan informan penelitian menggunakan teknik *purposive sampling*, dalam proses penelitian terinventarisir sumber data primer sebanyak 100 informan.

Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan data sekunder dengan cara observasi, wawancara mendalam dan dokumentasi. Dalam menganalisa menggunakan teknik analisis data kualitatif terdiri dari analisis domain,

taksonomi, komponensial, dan kultural.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Proses Implementasi tahap Organisasi Pelaksanaan.**

Dalam *open goverment partnership* terdapat pembagian sumber daya manusia yang dimana pembagian SDM di tingkat Dinas Kominfo sudah terbagi berdasarkan tupoksi sesuai dengan visi misi terkait keterbukaan informasi publik. Pembagian SDM dalam Dinas Kominfo sesuai dengan kebutuhan OGP seperti halnya sudah ada bagian yang menjadi rujukan pertanyaan akan semua informasi yang diperlukan terkait dengan OGP yaitu Kepala Seksi Pelayanan Publik, sudah adanya bagian yang menjadi wadah pengelolaan opini dan aspirasi publik yaitu Kepala Seksi Pengelolaan Opini dan Aspirasi Publik dst. Di dalam penelitian penulis mendapatkan beberapa temuan terkait pelaksanaan OGP di tingkat desa. Temuan tersebut sebagai berikut :

Pertama, dalam pelaksanaan OGP desa-desa yang mempunyai pembagian SDM yang baik hanyalah desa yang masuk dalam kategori desa terbuka dimana pembagian SDM sangat terstruktur dan memiliki dasar hukum yang pasti begitupun SOP yang telah menjadi landasan setiap pelayanan yang dilakukan. Untuk kategori desa selain desa terbuka belum memiliki pembagian SDM yang baik dan belum berjalan melihat faktor komunikasi dari Kepala Desa kepada staff belum berjalan dengan baik. Ditambah faktor SDM yang kurang melihat jumlah perangkat desa didominasi usia 45 keatas, belum memadainya tingkat pendidikan staff perangkat desa untuk mengemban tugas terkait pelaksanaan OGP dibidang teknologi informasi juga menjadi faktor terhambatnya program berjalan.

Kedua, dalam pembuatan Perkades dan Perdes hanya bisa dilaksanakan di desa

terbuka yaitu Desa Pejambon. Alasan pembentukan Perkades hanya bisa dilaksanakan di desa terbuka adalah kesiapan desa untuk menjalankan OGP menjadi faktor pertama. Apabila desa sudah siap dasar hukum yang menjadi landasan berjalannya program akan dibuat sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Namun, sebaliknya jika desa belum siap pembuatan dasar hukum OGP belum dibuat. Faktor yang mempengaruhi disini adalah faktor komunikasi berupa kejelasan dan konsistensi dari kepala desa untuk menjalankan OGP.

Ketiga, berdasarkan hasil penelitian penulis mendapati bahwa faktor penghambat di 3 desa yaitu Desa Mojoranu, Desa Cancung, dan Desa Sambiroto adalah faktor struktur organisasi. Struktur organisasi yang kurang baik antara kepala desa dengan staff seperti halnya tidak adanya tekanan dari pihak luar terkait SOP mempengaruhi berjalannya OGP menjadi kurang baik seperti pada tabel 30 yang menjelaskan SOP baru bisa dilaksanakan pada desa terbuka dan belum berjalan di 3 desa lainnya.

### **Implementasi tahap Interpretasi**

Interpretasi yang dilakukan dalam penelitian *open government partnership* menghasilkan bahwa dalam pelaksanaan interpretasi berupa musrenbangdes dan standar pelayanan operasional OGP belum berjalan dengan baik. Seperti halnya data penelitian yang dihasilkan penulis melalui penelitian OGP adalah sebagai berikut : Pertama, pelaksanaan musrenbangdes transparansi seperti pada tabel 28 di 4 desa yaitu Desa Pejambon, Desa Mojoranu, Desa Cancung, dan Desa Sambiroto belum berjalan dengan baik melihat bahwa dari 4 desa yang melaksanakan musrenbangdes secara berkala hanya Desa Pejambon yaitu melakukan forum pertemuan warga

dengan rutin setiap 1 bulan sekali. Jika dibandingkan dengan di 3 desa lainnya pelaksanaan musrenbangdes transparansi hanya dilakukan setahun sekali. Perbedaan disini yang menjadi titik dimana pengembangan transparansi keterbukaan OGP lebih cepat mengalami kemajuan di desa terbuka dibandingkan 3 desa lainnya.

Faktor-faktor yang menghambat dalam berjalannya musrenbangdes transparansi adalah faktor komunikasi kejelasan dan konsistensi dalam menjalankannya baik dari kepala desa dan perangkat desa. Faktor kedua adalah faktor struktur birokrasi yang tidak mempunyai kejelasan dalam pelaksanaannya dikarenakan tidak adanya pejabat khusus yang menangani OGP seperti halnya PPID.

Kedua, standar pelayanan prosedur OGP jika kita melihat pada tabel 30 pembuatan SOP transparansi baru dibuat dan dilaksanakan di desa terbuka. Dan di 3 desa lainnya pembuatan SOP belum dilaksanakan. Disinilah salah satu faktor penyebab terhambatnya perkembangan pelaksanaan OGP di tingkat desa. Faktor-faktor yang mempengaruhi tidak berjalannya SOP di 3 desa yaitu dijelaskan pada tabel 31 seperti komunikasi menjadi momok persoalan pertama yang dihadapi apabila suatu program tidak berjalan. Komunikasi yang kurang baik antara Kepala Desa dan staff menjadi persoalan yang sulit untuk diselesaikan. Kedua adalah faktor sumber sumber. Sumber-sumber disini lebih cenderung pada wewenang Kepala Desa yang tidak digunakan semaksimal mungkin dalam menjalankan OGP di tingkat desa. Dan ketiga adalah struktur

organisasi terkait kejelasan pembagian tugas dan wewenang setiap bagian yang tidak berjalan.

### **Implementasi Tahap Pelaksanaan**

Pelaksanaan dalam hal ini adalah menyangkut media informasi dan kualitas informasi. Berdasarkan data dan kesimpulan penulis mendapati bahwa proses implementasi pelaksanaan OGP belum berjalan dengan baik. pokok-pokok permasalahan yang terjadi pada proses pelaksanaan implementasi adalah sebagai berikut :

Pertama, dalam media informasi terbaginya proses- proses implementasi seperti website, media sosial, papan baliho, dan papan informasi. Jika melihat pada tabel 32, 34, dan 36 perbedaan yang signifikan bisa dilihat dari desa terbuka dengan ketiga 3 desa lainnya. Dalam penyediaan website dan media sosial hanya bisa berjalan dengan baik di desa terbuka sedangkan di 3 desa lainnya belum tersedia media informasi berupa website dan media sosial. Selanjutnya untuk papan informasi dan papan baliho semua desa sudah memenuhi dan menyediakannya guna mempermudah masyarakat dalam menerima informasi.

Faktor-faktor penghambat berjalannya media informasi seperti pada tabel 33 dijelaskan faktor-faktor penghambat adalah pertama komunikasi, tidak dipungkiri faktor komunikasi selalu menjadi pokok permasalahan pertama dalam berjalannya suatu program. Kejelasan, konsistensi akan menjadi permasalahan apabila tidak disampaikan dengan baik kepada staff. Faktor kedua adalah sumber-sumber. Sumber- sumber disini lebih menekankan pada staff yang

kurang kompeten dalam menjalankan tugasnya. Dibutuhkan staff perangkat desa yang kompeten untuk bisa melaksanakan media informasi berbasis teknologi dengan baik. Ketiga adalah kecenderungan. Kecenderungan disini menekankan pada insentif yang diberikan kepada staff perangkat desa yang menangani media informasi. Tidak adanya insentif tambahan akan menjadikan pekerjaan menjadi terhambat dan berhenti.

Kualitas informasi disini menyangkut tentang APBDesa, Profil Desa, dan hasil pembangunan. Jika melihat tabel 38 bisa dilihat bahwa pelaksanaan kualitas informasi berbasis teknologi informasi hanya bisa berjalan di desa terbuka. dan 3 desa lainnya belum adanya pelaksanaan di lapangan. Hal ini menyebabkan bahwa perkembangan OGP di tingkat desa mengalami hambatan dalam perkembangannya.

Kedua, faktor sumber-sumber. Sumber-sumber disini adalah tingkat pendidikan mempengaruhi berjalannya OGP. Seperti halnya pada tabel 15 bisa dilihat pendidikan di Desa Pejambon rata-rata adalah lulusan S1 yaitu 6 orang dan lulusan SMA 5 orang. Dan jika dibandingkan dengan Desa Mojoranu lulusan terbanyak adalah lulusan SMA sebanyak 6 orang dan S1 1 orang. Jika membandingkan 2 desa tersebut sudah terlihat bahwa tingkat pendidikan perangkat desa sangatlah berpengaruh dalam perkembangan OGP kedepannya.

Ketiga, faktor kecenderungan. Kecenderungan disini adalah lebih mengarah pada pengangkatan birokrasi yang salah. Pengangkatan staf yang tidak

kompeten bisa menimbulkan masalah di kemudian hari.

Keempat, struktur birokrasi. Kejelasan struktur birokrasi juga menjadi hambatan apabila struktur birokrasi penuh kesimpang siuran terkait tugas dan tanggung jawab.

## SIMPULAN

1. Implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik dan Intruksi Bupati Nomor 2 Tahun 2016 tentang keterbukaan informasi publik di Kabupaten Bojonegoro belum berjalan dengan baik, dilihat dari masih banyaknya desa yang belum memenuhi syarat-syarat yang telah diberlakukan untuk dipenuhi dalam berjalannya keterbukaan informasi publik.
2. Dilihat dari beberapa desa yang menjadi sampel peneliti banyak desa belum memiliki peraturan desa sebagai dasar hukum untuk mengatur berjalannya *open government partnership* dan belum adanya intruksi kepala desa untuk menjalankan keterbukaan informasi publik di desa.
3. Pada teknologi informasi, banyaknya desa yang belum memiliki transparansi secara langsung yaitu website dan media sosial. Dalam hal ini minimnya sumber daya manusia yang kompeten di bidangnya sehingga pelaksanaan teknologi informasi belum berjalan dan belum bisa diakses.
4. Pada tahap forum pertemuan warga belum diadakan forum pertemuan warga khusus terkait pembahasan keterbukaan informasi publik di banyak desa. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 masyarakat harus ikut andil di dalam pembuatan rencana pembangunan desa. Namun, dalam lapangannya. Banyaknya desa

yang belum menjalankan prinsip tersebut. hanya beberapa desa yang telah menjalankan forum pertemuan warga yang diadakan setiap bulannya.

5. Dalam pelaksanaan *open government partnership* di Kabupaten Bojonegoro. Faktor penghambat yang ditemukan berupa, faktor komunikasi yang kurang baik, kurangnya SDM yang khusus menangani keterbukaan informasi publik, serta kurangnya partisipasi dan dukungan dari Kepala Desa terhadap berjalannya OGP dengan baik dan benar.

## DAFTAR PUSTAKA

- Dinas Kominfo, *Menuju Gerbang Dunia Pemerintahan Terbuka Rakyat Bahagia*, Bojonegoro, 2017.
- Drs Syauckani, dkk, *Otonomi Daerah dalam Negara Kesatuan*, Pustaka Pelajar, Oet III, Yogyakarta, 2003.
- Dwiyanto, Agus.. *Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik*. Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 2005
- H. Nazar Bakry, *Tuntunan Praktis Metodologi Penelitian*, Pedoman Ilmu Jaya, Bandung, 1995.
- Hidayat, L.M, *Reformasi Administrasi: Kajian Komparatif Pemerintahan Tiga Presiden*. Jakarta: Gramedia Pustaka Umum, Jakarta, 2007
- Krina, *Indikator dan Alat Ukur Prinsip Transparasi, Partisipasi dan Akuntabilitas*, Kencana, Bandung, 2003.
- Kristianten, *Transparansi Anggaran Pemerintah*, Rineka Cipta, Jakarta, 2006
- Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, PT Bumi Aksara, Jakarta, 2004.

- Mardiasmo, *Konsep Ideal Akuntabilitas dan Transparansi Organisasi Layanan Publik*, Majalah Swara MEP, Vol. 3 No. 8 Maret, MEP UGM, Jogjakarta, 2003
- Suprastiyo, A. (2019). Implementasi Penyusunan Rencana Kerja (RKP) Desa (Studi Di Desa Trucuk Kecamatan Trucuk Kabupaten Bojonegoro). *Jurnal Ilmiah Manajemen Publik dan Kebijakan Sosial*, 2 (2), 255-263.
- Sedarmayanti, *Tercipta Good Governance*, Mandar Maju, Bandung, 2004
- Soetrisno Hadi, *Metodologi Riset*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2015.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, kualitatif, dan R&D*, Alfabeta, Bandung, 2015.
- Sugiyono, *Statistika Untuk Penelitian*, Alfabeta, Bandung, 2011.
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Rineka Cipta, Jakarta, 2002.
- Tuckman, Bruce W. *Measuring Procrastination Attitudinal and Behaviorally Paper Presented at Annual Meeting of the American Educational Research Association*, Boston, 1990.
- Usman, Nurdin, *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004